

PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI FUNGSI KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA

(Role of Stakeholder in Implementation of Conservation Function in Ir. H. Djuanda Forest Park)

FANDAWA SAPUTRA¹⁾, TUTUT SUNARMINTO²⁾ DAN HARNIOS ARIEF³⁾

^{1,2,3)} Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB
Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Email: fandawa67@gmail.com

Diterima 07 Desember 2018 / Disetujui 07 Mei 2019

ABSTRACT

Tahura as a conservation area has many benefits, functions, and impacts. This creates many interests and influences from various parties to Tahura Djuanda, so that the management of conservation in Tahura Djuanda needs to be managed together. Co-management is urgently needed to know each other's roles. Therefore, it is important to know the role of Tahura Djuanda Stakeholder in the implementation of conservation functions. The purpose of this study identifies the role of Stakeholder in the implementation of conservation functions and linkages among Stakeholder. This research was conducted in Tahura Djuanda and the location of Stakeholder existence, with the subject of research are Stakeholder and research object that is Tahura Djuanda. Data collection methods used were questionnaires, interviews, observation, and literature study. Tahura Djuanda's Stakeholder are 24 and grouped in government agencies, private institutions and community institutions. The role of Stakeholder in the aspects of protection, preservation, and utilization tends to be good with the interrelationship between Stakeholder that are mutually beneficial.

Keywords: conservation, roles, Stakeholder, Tahura Djuanda

ABSTRAK

Tahura sebagai kawasan konservasi memiliki banyak manfaat, fungsi, dan dampak. Hal tersebut menimbulkan banyaknya kepentingan dan pengaruh dari berbagai pihak terhadap Tahura Djuanda, sehingga pengelolaan konservasi di Tahura Djuanda perlu dikelola secara bersama. Pengelolaan bersama sangat diperlukan untuk saling mengetahui peran masing-masing pihak, sebab itu penting mengetahui peran Stakeholder Tahura Djuanda dalam implementasi fungsi konservasi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi peran Stakeholder dalam implementasi fungsi konservasi serta keterkaitan antar Stakeholder. Penelitian dilakukan di Tahura Djuanda dan lokasi keberadaan Stakeholder, dengan subjek penelitian yaitu Stakeholder dan objek penelitian yaitu Tahura Djuanda. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Stakeholder Tahura Djuanda berjumlah 24 dan dikelompokkan dalam lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga masyarakat. Peran Stakeholder dalam aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan cenderung baik dengan keterkaitan antar Stakeholder yang berifat saling menguntungkan

Kata kunci: konservasi, peran, Stakeholder, Tahura Djuanda

PENDAHULUAN

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Tahura Djuanda) sebagai kawasan konservasi memiliki banyak manfaat, fungsi, dan dampak sosial ekonomi yaitu sarana lingkungan perkotaan, pengamanan jaringan sarana prasarana, meningkatkan kualitas udara di sekitar Tahura, menunjang pelestarian air dan tanah. Kendati demikian, Tahura Djuanda juga memiliki beberapa permasalahan terkait fungsinya sebagai kawasan konservasi seperti pengelolaan wisata yang masih tumpang tindih dengan masyarakat, adanya areal Tahura Djuanda yang ditanami oleh masyarakat, dan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang mulai keluar kawasan dan mengganggu pertanian masyarakat sekitar.

Manfaat, fungsi dan dampak baik positif maupun negatif yang berasal dari Tahura Djuanda sebagai

kawasan konservasi akan memengaruhi pihak lain, mengakibatkan Tahura Djuanda perlu melibatkan pihak lain secara bersama-sama dalam mengelola Tahura Djuanda. Kesadaran perlunya partisipasi publik didasarkan atas perhatian para pengambil kebijakan akan kebutuhan untuk memahami para pihak yang terpengaruh (Nurfatriani 2015). *Stakeholder* merupakan kelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi melalui proses pencapaian tujuan dari suatu organisasi yang merupakan dampak dari kegiatan operasional organisasi (Freeman 1984). *Stakeholder* dapat pula didefinisikan sebagai pihak-pihak mempengaruhi dan atau dipengaruhi kebijakan dan tindakan dengan kepentingan yang berbeda, baik individu, kelompok ataupun organisasi dalam berbagai ukuran (Suporahardjo 2005). Pengelolaan secara bersama sangat memerlukan setiap pihak mengetahui perannya

dan peran pihak lainnya. Terkait hal tersebut dan pentingnya fungsi konservasi, sangat diperlukan penelitian guna mengetahui peran *Stakeholder* dalam implementasi fungsi konservasi di Tahura Djuanda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi peran *Stakeholder* dalam implementasi fungsi konservasi serta keterkaitan antar *Stakeholder* di Tahura Djuanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Tahura Djuanda dan sekitarnya dalam wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Data penelitian dikumpulkan pada rentang bulan April-Mei 2018.

Data yang dikumpulkan yaitu persepsi *Stakeholder* dalam fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa *Stakeholder* adalah para pemilik perusahaan, pemilik modal atau pemilik asset, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan pemahaman tersebut, *Stakeholder* responden penelitian yaitu semua *Stakeholder* yang terlibat atau memiliki keterlibatan terhadap Tahura Djuanda sebagai kawasan konservasi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga swasta yang berjumlah 23 pihak. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup dengan 7 skala (Avenzora 2008) yang disintesis dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.

Analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah penjabaran secara deskriptif hasil pengolahan data kuesioner skala likert 1-7 yang dimodifikasi (Avenzora 2008). Skala tersebut memiliki nilai yaitu 1 (sangat tidak baik), 2 (tidak baik), 3 (agak tidak baik), 4 (biasa saja), 5 (agak baik), 6 (baik), dan 7 (sangat baik).

Analisis SWOT digunakan sebagai cara untuk menentukan pengembangan strategi pada tahapan selanjutnya, apabila hasil perhitungan menunjukkan skala 1-3 maka akan masuk ke dalam kelemahan (*weakness*) atau ancaman (*threat*), jika skala 4 maka biasa saja, dan jika skala 5-7 maka akan masuk ke dalam kekuatan (*strength*) atau peluang (*opportunity*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Stakeholder* Tahura Djuanda

Stakeholder Tahura Djuanda berjumlah 24 pihak yang terdiri dari perorangan, kelompok, organisasi, maupun instansi dengan kepentingannya masing-masing. Lembaga Pemerintah yang termasuk dalam *Stakeholder*

Tahura Djuanda yaitu terkait pengelolaan administrasi, keamanan serta pada aspek konservasi. *Stakeholder* pengelolaan administrasi terdiri dari 6 desa, 2 kelurahan, dan 4 kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. *Stakeholder* pengelolaan keamanan terdiri dari Polsek Cimencyan, Polsek Lembang, dan TNI Koramil 0901. Terkait pengelolaan aspek konservasi terdiri atas BKSDA Jawa Barat dan UPTD Djuanda. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga swasta yang termasuk *Stakeholder* Tahura Djuanda berjumlah 4 yaitu The Lodge Maribaya, Maribaya Natural Hot Spring Resort, Resor Dago Pakar, dan Bandung Archery Club. Lembaga swasta merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak-pihak swasta dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lembaga swasta tersebut seluruhnya bergerak dalam bidang wisata. Secara lengkap *Stakeholder* Tahura Djuanda tersaji pada Tabel 1.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Lembaga masyarakat yang terkait dalam pengelolaan Tahura Djuanda yaitu Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) dan Paguyuban Warga Pedagang (PWP). MMP merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dari desa/kelurahan lingkaran Tahura Djuanda yang dilakukan oleh UPTD Djuanda untuk membantu tugas pengamanan dan pelestarian kawasan, sedangkan PWP merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi yaitu pemberian lapak dan warung dalam Tahura Djuanda yang digunakan untuk berdagang.

Masyarakat yang terkait dalam pengelolaan Tahura Djuanda selain MMP dan PWP yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan sosok yang dituakan dalam suatu lingkup masyarakat. Tokoh masyarakat terlibat dalam aspek pelestarian kawasan terutama dalam sosialisasi Tahura Djuanda ke masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian kawasan seperti penanaman. UPTD Djuanda juga selalu meminta pendapat tokoh masyarakat di beberapa desa terkait pengelolaan yang berhubungan dengan masyarakat.

Tabel 1 *Stakeholder* Taman Hutan Raya Ir H Djuanda

No	Lembaga Pemerintah	Lembaga Masyarakat	Lembaga Swasta
1	BKSDA Jawa Barat	Tokoh Masyarakat	Maribaya Natural Hot Spring Resort
2	UPTD Djuanda	Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP)	Resor Dago Pakar
3	Kec. Cimenyan	Paguyuban Warga Pedagang (PWP)	The Lodge Maribaya
4	Kecamatan Cidadap		Bandung Archery Club
5	Kecamatan Coblong		
6	Kecamatan Lembang		
7	Desa Cibureal		
8	Desa Cimenyan		
9	Desa Mekarwangi		
10	Desa Langensari		
11	Desa Wangunharja		
12	Desa Cibodas		
13	Kelurahan Ciumbuleuit		
14	Kelurahan Dago		
15	Polsek Cimenyan		
16	Polsek Lembang		
17	TNI Koramil 0901		

2. Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Fungsi Konservasi

Sarwono (2015) membagi peristilahan dalam teori peran menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku, d) Kaitan antara orang dan perilaku. Peran *Stakeholder* Tahura Djuanda dalam penelitian ini hanya dikaji dari implementasi fungsi konservasi. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Tahura Djuanda terdapat program konservasi yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan (UPTD Djuanda 2014). UPTD Djuanda selaku pengelola utama tidak dapat mengelola Tahura Djuanda secara mandiri tetapi membutuhkan peran *Stakeholder* dalam bentuk kerjasama atau kolaborasi untuk mendukung usaha konservasi (UPTD Djuanda 2014). Friedman dan Miles (2006) menyatakan konsep teori *Stakeholder* dijabarkan dalam dua prinsip, yaitu *principle of corporate legitimacy* dan *the Stakeholder fiduciary principle* yaitu yang dimaksud organisasi harus dikelola untuk kepentingan *Stakeholder* dan manajemen memiliki hubungan fidusia, menjaga kepentingan *Stakeholder* dan organisasi berumur panjang. Penjelasan peran *Stakeholder* dalam implementasi fungsi konservasi yang terdiri dari aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Aspek perlindungan

Aspek perlindungan yang dimaksud yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan serta pengamanan kawasan. Hal tersebut sesuai dengan PP 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. UPTD Djuanda pada aspek perlindungan sudah melakukan peran dan fungsinya dengan baik dengan nilai pada kedua kriteria dalam aspek perlindungan pada kategori 6 (baik). UPTD Djuanda telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal

pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman di lahan yang gundul dan penanggulangan longsor yang tanggap bekerjasama dengan MMP dan masyarakat sekitar. UPTD Djuanda juga rutin mengadakan sosialisasi terkait keamanan kawasan, pal batas, dan patroli rutin baik dalam kawasan maupun luar kawasan. Hasil penilaian persepsi *Stakeholder* pada aspek perlindungan disajikan pada Gambar 1.

Lembaga swasta dalam fungsi pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan bernilai 5 (agak baik) sedangkan dalam pengamanan kawasan bernilai 4 (biasa saja). Lembaga swasta terlibat dalam pengelolaan sampah berupa pembersihan Sub DAS Cikapundung, dan rehabilitasi kawasan berupa penanaman batas kawasan. Pengamanan kawasan yang dilakukan lembaga swasta secara tertulis maupun implementatif biasa saja. Terdapat nilai 5 yaitu pada pengamanan luar dan dalam kawasan, namun pada implementasinya hanya sebatas pada daerah terdekat dari wilayah pengelolaan instansi tersebut.

Lembaga Masyarakat memiliki nilai 5 (agak baik) yang pada peran aspek perlindungan. Berdasarkan hasil observasi lembaga masyarakat sangat paham jika hutan perlu dijaga karena memberikan manfaat terutama manfaat air, oleh karena itu masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dan pembersihan DAS Cikapundung. Selain itu, tugas dan fungsi utama dari MMP selain aspek keamanan kawasan juga turut terlibat dalam pelestarian lingkungan berupa penanaman kawasan, pengkayaan kawasan, dan berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan. Lembaga Masyarakat memiliki nilai terkecil pada aspek perlindungan dalam hal penetapan pal batas blok perlindungan. Hal ini karena masyarakat berpendapat bahwa penetapan pal batas merupakan ranah dari UPTD Djuanda dan pemerintah.

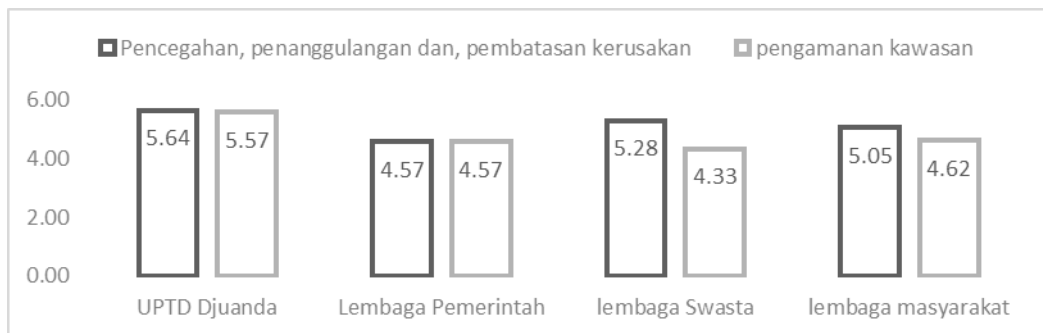
b. Aspek pengawetan

Aspek pengawetan berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem yaitu pengelolaan keanekaragaman dan habitat serta pemulihan ekosistem (PP No. 108 Tahun 2015). Terkait aspek pengawetan UPTD Djuanda memiliki skor pada kategori 6 (baik). Kegiatan yang dilakukan UPTD Djuanda pada aspek pengawetan meliputi inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi ekosistem, pembersihan DAS Cikapundung dan pengelolaan batas kawasan. Selain itu, UPTD Djuanda bekerja sama dengan pihak BKSDA Jawa Barat melakukan penangkaran Rusa Timor serta pengkoleksian satwaliar dan tumbuhan lain di dalam Tahura Djuanda. UPTD Djuanda juga melakukan. Nilai persepsi *Stakeholder* tersaji pada Gambar 2.

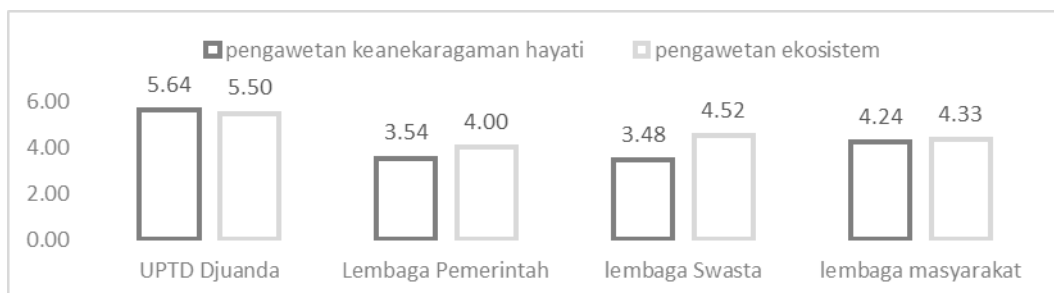
Pihak Lembaga Pemerintah memiliki skor pada kategori 4 (biasa saja), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pemerintah agak tidak terlibat (kategori 3) dalam inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati. Pemerintah agak terlibat dalam penanaman vegetasi serta pemulihan DAS. Hal tersebut karena Pemerintah memiliki program aksi lingkungan berupa penanaman pohon dan pembersihan DAS Cikapundung. Penanaman pohon dan pembersihan DAS Cikapundung dilakukan Pemerintah bekerjasama dengan pihak UPTD Djuanda dalam penyediaan bibit dan akses kelokasi DAS Cikapundung.

Lembaga swasta pun agak tidak terlibat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Lembaga swasta akan langsung menghubungi pihak UPTD Djuanda jika berkenaan dengan fauna dan flora. Terkait pengelolaan pemulihan ekosistem memiliki kategori 5 yang berarti agak terlibat terutama dalam pemulihan DAS Cikapundung dan rehabilitasi kawasan berupa penanaman vegetasi. Kegiatan pembersihan DAS Cikapundung yang dilakukan lembaga swasta meliputi pembersihan sampah yang dilakukan setiap minggu dengan tujuan melestarikan sungai dan membuat wisatawan nyaman berkunjung ke tapak wisata lembaga tersebut. Selain itu, Lembaga swasta juga juga bekoordinasi dengan pihak UPTD Djuanda untuk bibit dan lokasi penanaman di areal Tahura Djuanda.

Lembaga masyarakat dalam aspek pengawetan bernilai 4 yang bermakna biasa saja. Sementara itu, pada aspek kebijakan ekosistem serta pengawetan keanekaragaman hayati dan habitat serta penelitian masyarakat agak tidak terlibat. Hal ini karena masyarakat memang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan kegiatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati. Terkait penelitian, masyarakat tidak terlibat dan percaya apa yang disosialisasikan oleh pihak UPTD Djuanda. Pada kegiatan pemulihan DAS, rehabilitasi ekosistem dan penanaman vegetasi masyarakat memiliki nilai yang masuk kategori agak terlibat. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan yang diadakan oleh UPTD Djuanda.



Gambar 1 Nilai persepsi *Stakeholder* pada aspek perlindungan



Gambar 2 Nilai persepsi *Stakeholder* pada aspek pengawetan

c. Aspek pemanfaatan

UPTD Djuanda memiliki skor 5 yang berarti agak dilakukan pada semua kriteria. Pemanfaatan dilakukan secara lestari dengan kaidah-kaidah konservasi. Pemanfaatan yang dilakukan oleh UPTD Djuanda berupa wisata, air, jasa lingkungan, tumbuhan dan satwaliar. Kebijakan pemanfaatan lingkungan dilakukan di blok pemanfaatan, sedangkan pemanfaatan air diperoleh dari mata air yang tersebar dalam Tahura Djuanda. Aspek pemanfaatan wisata dilakukan di blok pemanfaatan dengan objek utama berupa curug, goa dan koleksi satwa dan tumbuhan yang tersebar di Tahura Djuanda. UPTD Djuanda memiliki kategori agak tidak terlibat dalam mekanisme pemanfaatan karbon. UPTD Djuanda sudah melakukan perhitungan karbon yang ada di Tahura Djuanda namun belum terealisasi. Sementara itu, inventarisasi dan identifikasi potensi keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan masuk dalam kategori agak terlibat.

Sebagian Lembaga Pemerintah memiliki nilai 4 masuk dalam kategori biasa saja dalam aspek pemanfaatan karena memang pemerintah kurang terlibat dalam aspek pemanfaatan. Namun demikian, pemerintah memiliki nilai 6 pada pemanfaatan air karena lingkaran desa Tahura Djuanda hampir seluruhnya memanfaatkan air dari hutan. Pemerintah juga memiliki nilai tidak terlibat dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi tumbuhan dan satwaliar. Hal ini karena UPTD Djuanda tidak melibatkan pemerintah dalam kegiatan tersebut.

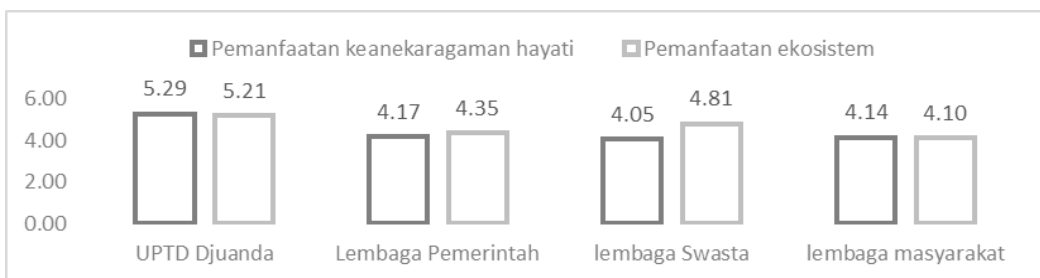
Lembaga swasta memiliki skor 5 pada pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama kegiatan pemanfaatan wisata dan air. Objek dan daya Tarik yang disajikan adalah kondisi lingkungan yang asri dan sejuk, sungai yang masih dalam kondisi baik, pemandangan pegunungan serta pemberian izin atau kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan. Pihak swasta memiliki kerjasama atau perizinan yang terdiri dari perizinan lokasi wisata, perlintasan pipa air, pemanfaatan air, dan izin pengambilan foto/video dari pemandangan yang ada di Tahura Djuanda. Aspek tumbuhan dan satwaliar memiliki nilai skor 4 hal ini biasa saja dalam aspek pemanfaatan. Hal ini memang lembaga swasta tidak menekankan keanekaragaman hayati sebagai objek daya

tarik wisata, namun ada bentuk pemanfaatan tumbuhan menjadi dek foto, serta menjadi atraksi yaitu monyet ekor panjang yang masuk kedalam lokasi wisata. Persepsi *Stakeholder* terhadap aspek pemanfaatan tersaji pada Gambar 3.

Lembaga masyarakat memiliki skor 4 namun pada kenyataannya masyarakat sangat memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari yang berasal dari Tahura Djuanda dan pemanfaatan air ini masuk dalam kategori sangat dilakukan. Masyarakat tidak memanfaatkan kondisi lingkungan lain seperti untuk listrik, budidaya atau penyimpanan karbon. Lembaga masyarakat memanfaatkan tumbuhan hanya untuk kebutuhan tradisional berupa kayu bakar kering, dan bambu tua. Secara hukum pemanfaatan kayu bakar dan bambu tidak diizinkan namun pihak UPTD Djuanda memberi toleransi kepada masyarakat dengan syarat tidak merusak lingkungan, tidak menebang, dan untuk kayu bakar yang benar-benar kering. Sementara itu, untuk pengelolaan satwaliar masyarakat agak tidak dilakukan karena masyarakat menyadari bahwa satwa yang ada di Tahura Djuanda dilindungi oleh pemerintah.

3. Keterkaitan Antar *Stakeholder*

Keterkaitan dan hubungan para pihak dalam pengelolaan aspek konservasi Tahura Djuanda berbentuk kerjasama, kemitraan, perizinan, administrasi, keamanan, dan batas wilayah. Keterkaitan *Stakeholder* dapat berupa kaitan yang positif berupa kolaborasi, koordinasi, dan kontribusi (Manullang 2018). UPTD Djuanda dalam pengelolaan konservasi menjadi poros utama dan terbagi menjadi 2 Sub unit yaitu Sub unit Negla dan Sub unit Maribaya. Sub unit Negla berkaitan dengan *Stakeholder* Resor Dago Pakar, Bandung Archery Club, MMP, PWP, Polsek Cimenyan, Kecamatan Cidap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cimenyan, Kelurahan Ciumbuleuit, Kelurahan Dago, Desa Ciburial, dan Desa Cimenyan. Sub unit Maribaya berkaitan dengan The Maribaya Natural Hot Spring Resort, The Lodge Maribaya, Polsek Lembang, Koramil TNI 0901, MMP, Kecamatan Lembang, Desa Cibodas, Desa Wangunhardja, Desa Mekarwangi, dan Desa Langensari. Sementara itu, Pihak BKSDA dan PEMDA langsung berkaitan dengan UPTD Djuanda.



Gambar 3 Nilai persepsi *Stakeholder* pada aspek pemanfaatan

Berdasarkan bentuk kerjasama yang terjalin, hubungan antara The Lodge Maribaya, Maribaya Natural Hot Spring Resort dan Bandung Archery Club yaitu kerjasama dalam pemanfaatan wisata. Kemitraan yang terjalin dari Tahura Djuanda yaitu MMP dan PWP. Kemitraan ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, bentuk kolaborasi yang terjalin adalah dalam pemulihan DAS Cikapundung yang melibatkan UPTD Djuanda, PEMDA, dan Masyarakat. Bentuk perizinan dilakukan oleh Resor Dago Pakar yaitu perizinan perlintasan

Keterkaitan antar *Stakeholder* menunjukkan berbagai bentuk kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi bahkan ditemukan beberapa keterkaitan yang tidak seharusnya dilakukan, hal tersebut termasuk hubungan positif yang biasa disebut *Stakeholder* kawan (Manullang 2018).

Overseas Development Administration (ODA) (1995) mengkategorikan peran *Stakeholder* terhadap suatu isu, *Stakeholder* dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu:

1. *Stakeholder* Utama (primer)

Stakeholder utama merupakan *Stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Satakeholder di Tahura Djuanda yang masuk ke dalam kategori ini adalah:

a. Masyarakat dan tokoh masyarakat: Masyarakat yang terkait dengan Tahura Djuanda, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari keputusan yang dibuat oleh UPTD Djuanda. Masyarakat sekitar Tahura Djuanda mendapat manfaat berupa pemanfaatan air dan bentuk pemberdayaan masyarakat. Tokoh masyarakat: anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai penghubung kepentingan UPTD Djuanda dengan masyarakat.

b. Pihak Manajer publik lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan yaitu UPTD Djuanda. Doering (1995) mengatakan peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah sederhana.

2. *Stakeholder* Pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah *Stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan

proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Satakeholder di Tahura Djuanda yang masuk ke dalam kategori ini adalah:

a. Lembaga (aparatus) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.

b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

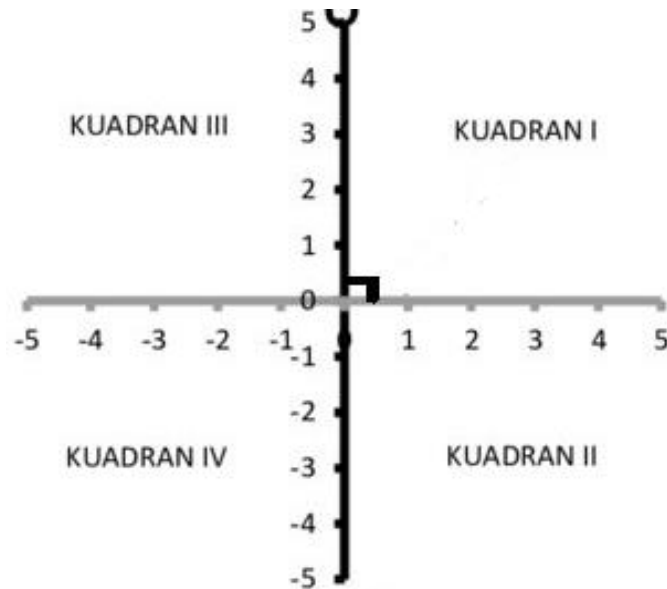
c. Pengusaha (badan usaha) terkait yang terdiri atas The Lodge Maribaya, Maribaya Natural Hot Spring Resort, Resor Dago Pakar, serta Bandung Archery Club.

Menurut Kartini (2009) pengakuan terhadap adanya berbagai *Stakeholder* di luar pemegang saham (*Shareholders*) yang dapat memengaruhi efektifitas pencapaian tujuan instansi telah mengubah dimensi tanggung jawab sosial instansi, dari tanggung jawab terhadap fokus pengelolaan semata-mata menjadi tanggung jawab kepada sejumlah *Stakeholder* yang lebih luas. *Stakeholder* memiliki peran penting bagi UPTD Djuanda. Hal ini ditandai dengan tujuan dan misi UPTD Djuanda yang selalu berkaitan dengan upaya pengintegrasian antara tujuan dan misi UPTD Djuanda dengan kondisi dan peran *Stakeholder* bagi UPTD Djuanda. Diketahui bahwa *Stakeholder* (masyarakat, aparat pemerintahan dan mitra bisnis) memiliki keterkaitan dan peran yang jelas dalam mendukung UPTD Djuanda, baik dari segi struktural hingga aplikasi dari setiap kebijakan dan proses program yang dituntut untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan.

4. Peran *Stakeholder* Taman Hutan Raya Menurut Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil identifikasi peran *Stakeholder* dalam implementasi fungsi konservasi. Hasil tersebut lalu dikategorikan kedalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Rangkuti 1997). Hasil perhitungan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pengelolaan konservasi dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Tahura Djuanda menunjukkan strategi SO yang artinya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia (Rangkuti 1997). Strategi SO dapat dilakukan melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta dalam kolaborasi pengamanan serta pemanfaatan potensi bentang alam dan potensi keanekaragaman hayati untuk wisata.



Gambar 4 Diagram SWOT

SIMPULAN

Peran *Stakeholder* Tahura Djuanda tergolong positif dalam pengelolaan pada aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Lembaga masyarakat memiliki nilai tertinggi pada aspek perlindungan dan pengawetan, sedangkan lembaga swasta memiliki nilai tertinggi pada aspek pemanfaatan. Keterkaitan antar *Stakeholder* bersifat saling menguntungkan antara UPTD Djuanda dengan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Avenzora R. 2008. *Ekoturisme-Teori dan Praktek*. Nias (ID): BRR NAD.
- Brancalion PHS, Pinto SR, Pugliese L, Padovezi A, Rodrigues RR, Calmon M, Carrascosa H, Castro P, Mesquita B. 2016. Governance innovations from a multi-*Stakeholder* coalition to implement large-scale forest restoration in Brazil. *World Development Perspectives*. 3: 15-17.
- Doering R 1995. Evaluating round table processes. National round table review. *Winter*. 1: 1-3.
- Freeman RE. 1984. *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. Cambridge (US): University of Minnesota.
- Friedman AL, Miles S. 2006. *Stakeholders. Theory and Practice*. New York (US): OXFORD University Press.

- Kartini D. (2009). *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung (ID): PT Refika Aditama.
- Manullang S. 2018. *Teori dan Praktek Analisis Stakeholder*. Bogor (ID) : IPB Press
- Nurfatriani. 2015. Analisis pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan fiskal hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2) : 105 – 124
- [ODA] *Overseas Development Administration*. 1995. *Guidance Note on how to do Stakeholder Analysis of aid Projects and Programmes*. London (UK): ODA
- Phillips R, Freeman RE, Wicks AC. 2003. What *Stakeholder* theory is not. *Business Ethics Quarterly*. 13(4): 479-502.
- Rangkuti F. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwono SW. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta (ID) : Rajawali Pers.
- Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor (ID): Pustaka Latin.
- [UPTD Djuanda] Unit Pelaksana Teknis Daerah Djuanda. 2014. *Rencana Pengolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Ir H Djuanda*. Bandung (ID): UPTD Djuanda.